

STRATEGI PEMERINTAH KOTA BONTANG DALAM MENCAPAI PENGHARGAAN ADIPURA TAHUN 2014

Fitria Indah Cahyani¹

Abstrak

Fitria Indah Cahyani, program studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda. Strategi Pemerintah Kota Bontang dalam Mencapai Penghargaan Adipura Tahun 2014. Dibawah bimbingan Bapak Drs. H. Burhanudin, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Erwin Resmawan, M.Si, sebagai pembimbing II.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui strategi Pemerintah Kota Bontang dalam mencapai penghargaan Adipura di tahun 2014 yang difokuskan pada proses penataan kondisi fisik lingkungan perkotaan, pengelolaan operasional kebersihan dan program sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah.

Penelitian dilaksanakan di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara langsung dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Adapun yang menjadi narasumber yaitu Walikota Bontang, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH), Kassubid Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang, Kepala Bidang Kebersihan dan Kepala Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam kebakaran Kota Bontang beserta masyarakat, untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai dengan kebutuhan penulis. Data-data yang didapatkan, dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif Milles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan Strategi Pemerintah Kota Bontang dalam mencapai penghargaan Adipura Tahun 2014 sudah berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Bontang dalam mewujudkan strategi tersebut dilakukan dengan memaksimalkan kinerja petugas kebersihan di lapangan. Petugas kebersihan masing-masing diberikan bonus sebagai motivasi kerja selama penghargaan Adipura dapat dipertahankan. Kemudian untuk memenuhi indikator penilaian Adipura, Pemerintah Kota Bontang bekerjasama dengan stakeholder dalam mewujudkan penataan kota yang bersih, hijau teduh, aman dan nyaman. Secara garis besar Pemerintah Kota Bontang sudah berhasil meraih penghargaan Adipura pada tahun 2014 dan memenuhi standar penilaian yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Adipura.

Kata Kunci : *Strategi, Penghargaan Adipura*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: fitriaindahcahyani.fic@gmail.com

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945, selain itu adanya kebijakan nasional tentang kelestarian lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang direvisi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Untuk menjaga lingkungan agar tetap nyaman dan lestari maka masalah kebersihan lingkungan dan ketersediaan ruang terbuka hijau harus menjadi perhatian semua pemangku kepentingan. Membahas kerentanan lingkungan, hal ini lebih banyak dijumpai pada situasi lingkungan perkotaan, dimana faktor manusia merupakan penyumbang terbesar terhadap kerusakan lingkungan, dengan jumlah penduduk perkotaan yang padat akan berdampak pada tekanan lingkungan, dimana lahan menjadi sempit dan berkurangnya ruang terbuka hijau, dan juga meningkatnya konsumsi masyarakat, yang menimbulkan masalah baru yakni, volume, jenis dan karakteristik sampah, yang apabila tidak ditangani dengan baik, akan berdampak pada masalah-masalah lingkungan dan kenyamanan kehidupan warga perkotaan.

Untuk terciptanya pengelolaan lingkungan hidup perkotaan yang bersih, teduh dan berkelanjutan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup melahirkan suatu program Adipura, sebagai dorongan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dibidang lingkungan hidup, salah satunya dalam bentuk penghargaan Adipura yang diberikan terhadap Kabupaten/Kota yang dinyatakan berhasil dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan sebagai kota terbersih dan teduh.

Sesuai dengan mandat Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan visi pembangunan berkelanjutan dengan rencana kerja yang diprioritaskan kepada *Good Environmental Governance*, dimana lingkungan yang terjaga dengan baik diharapkan akan mendukung program *Good Governance* dengan melibatkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih dalam pengelolaan lingkungan perkotaan.

Kota Bontang dalam hal ini sebagai salah satu peserta kategori kota sedang, yang pada tahun 2014 berhasil meraih penghargaan Adipura untuk yang ketujuh (7) kalinya, sejak tahun 2008. Dari kondisi fisik kota Bontang, mempunyai tata kota yang cukup baik. Pemerintah kota Bontang mampu mewujudkan semboyan dari kota Bontang, yaitu kota TAMAN (Tertib, Agamis, Mandiri, Aman, Nyaman).

Penghargaan Adipura diserahkan bertepatan dengan peringatan hari Lingkungan Hidup sedunia yang diperingati setiap 5 Juni setiap tahunnya. Penghargaan ini diberikan kepada kota di Indonesia yang dinilai berhasil dalam menangani kebersihan dan keteduhan kota. Adapun yang menjadi landasan hukum dari adanya program Adipura ini, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura. Dalam upaya meraih dan mempertahankan penghargaan

Adipura setiap tahunnya, tentu diperlukan yang namanya strategi, maka melalui penelitian ini dan sesuai fakta keberhasilan Pemerintah Kota Bontang dalam Program Adipura (2008-2014), untuk itu perlu diteliti seperti apa strategi dibalik kesuksesan tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan melalui penelitian ini, maka rumusan masalah itu adalah :

Bagaimana Strategi Pemerintah Kota Bontang dalam Mencapai Penghargaan Adipura tahun 2014 ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bontang dalam meraih dan mempertahankan penghargaan Adipura.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini, secara pribadi merupakan salah satu upaya penulis dalam mengembangkan dan mengimplikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama ini, baik yang berasal dari internal kampus pada khususnya dan eksternal kampus pada umumnya. Jika penelitian ini berhasil dilakukan maka akan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan bagi mahasiswa FISIP khususnya program studi Ilmu Pemerintahan yang ingin mengembangkan penelitian ini kedepannya.
- b. Memberikan masukan bagi pihak yang terkait dalam pelaksanaan strategi Pemerintah terkait penghargaan Adipura tahun 2014.

KERANGKA DASAR TEORI

Pengertian Strategi

Menurut Porter dalam Rangkuti (2002:3) strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai tujuan bersaing. Selanjutnya Morris dalam Umar (2002:31), menegaskan bahwa strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu upaya bagaimana agar tujuan dapat tercapai.

Ditambahkan oleh Alwi (2001:78) yang mengemukakan bahwa strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dengan melibatkan semua faktor andalan dalam organisasi secara strategi.

Dari beberapa pandangan para ahli yang mengungkap beberapa teori diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah cara atau metode yang digunakan untuk

mencapai tujuan tertentu. Karena pada dasarnya strategi masih bersifat konseptual tentang keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan, dan untuk mengimplementasikannya perlu digunakan berbagai metode atau cara tertentu.

Dinamika Kota

Lingkungan perkotaan mencakup dimensi yang lebih luas, yakni dimensi sosial, politik, dan ekonomi dari dampak proses urbanisasi yang cepat. Pendekatan ilmu lingkungan dalam studi pemerintahan kota merupakan pendekatan yang paling baru, yang bersifat interdisipliner antara ilmu sosial dan ilmu alam.

Penggunaan konsep dan teori ilmu alam dalam studi lingkungan perkotaan ditujukan untuk memberikan penjelasan secara ilmiah terhadap masalah-masalah lingkungan yang dihadapi sehari-hari oleh penduduk kota. Sampai saat ini manajemen lingkungan perkotaan di Indonesia masih belum terbentuk pola yang jelas, karena terdapat berbagai instansi yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan.

Penanganan pencemaran air sungai ditangani pemerintah pusat dan propinsi. Sedangkan badan pengendalian dampak lingkungan dalam hal ini menetapkan kebijaksanaan umum yang menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi. Badan ini sebagai *licensing agency* yang memberikan legalisasi pada dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Sedangkan pengelolaan masalah sampah kota ditangani oleh pemerintah kota itu sendiri dan bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan seperti LKMD dan RT/RW. Badan pengendalian dampak lingkungan bekerja sama dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Dalam Negeri setiap tahun melakukan *performance assessment* dalam bentuk program Adipura terhadap kemampuan pengelolaan sampah sesuai dengan ukuran kota, diantaranya kota kecil, kota sedang, dan kota besar.

Manajemen Lingkungan Perkotaan

Empat agenda lingkungan yang umum dihadapi oleh aparat pemerintah kota adalah :

- a. Akses terhadap infrastruktur dan pelayanan lingkungan
- b. Polusi dari limbah dan emisi
- c. Hilangnya sumber daya alam, seperti pencemaran air tanah ataupun penurunan permukaan tanah
- d. Bencana lingkungan, baik karena faktor alam, maupun manusia.

Masalah lingkungan yang berkaitan dengan masalah sosial-ekonomi di daerah perkotaan dikenal dengan “agenda coklat” (*brown agenda*). Polusi udara, kerusakan lingkungan dan kemiskinan berkaitan dengan pembangunan, pertumbuhan, pendapatan, komitmen pada isu-isu lingkungan, dan pemanasan global, serta penurunan kualitas sumber daya alam. Agenda yang mendesak untuk dipecahkan oleh pemerintah kota adalah memperbaiki akses semua pemukiman, terutama pemukiman yang dihuni oleh masyarakat berpendapatan menengah ke

bawah terhadap infrastruktur dasar lingkungan hidup, seperti sanitasi, gorong-gorong, pembuangan sampah, dan air bersih. Sanitasi merupakan fasilitas dasar lingkungan yang harus dipenuhi oleh pemerintah kota. Hampir sebagian besar Negara berkembang, sumber polutan berasal dari kotoran manusia.

Pelayanan sampah kota merupakan fasilitas lingkungan kedua yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Masalah sampah merupakan masalah rutin yang dihadapi oleh pemerintah kota disemua Negara. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) selalu menjadi masalah. Kota-kota besar banyak mengalami masalah dalam mencari lahan yang tersedia untuk TPA, karena semakin langkanya atau mahalnnya tanah dan semakin padatnya penduduk. Fasilitas dasar ketiga adalah air bersih. Masalah polusi air parallel dengan kondisi akses pada prasarana dasar lingkungan hidup. Sebagai akibat dari buruknya akses tersebut, limbah rumah tangga dan industri mencemari permukaan air, yang menjadi sumber air bersih penduduk kota.

Pengertian Adipura

Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura merupakan salah satu program prioritas dalam pengendalian pencemaran dari kegiatan domestik dan penghargaan bagi Kota/Kabupaten yang memiliki komitmen dalam mewujudkan Kota Bersih dan Hijau (*Clean and Green City*). Sasaran dari Program Adipura adalah terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan lingkungan yang baik (*good environment*).

Adapun tujuan dari program Adipura yaitu, sebagai berikut :

- a. Untuk mendorong kepemimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Membangun partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha.
- c. Mewujudkan kota-kota yang berkelanjutan baik secara ekologis, sosial dan ekonomi.
- d. Mendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance* dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Indikator Penilaian Adipura

Kriteria Adipura terdiri dari 2 indikator pokok, yaitu:

- 1) Indikator kondisi fisik lingkungan perkotaan dalam hal kebersihan dan keteduhan kota.
- 2) Indikator pengelolaan lingkungan perkotaan (non-fisik), yang meliputi institusi, manajemen, dan daya tanggap.

Kriteria penilaian saat ini lebih diperketat lagi yakni dengan bertambahnya indikator penilaian, tidak hanya masalah sampah saja, tapi juga air, udara, dan ruang terbuka hijau. Pelaksanaan penyelenggaraan Program Adipura meliputi penilaian non fisik dan pemantauan fisik. Secara garis besar penilaian non fisik dan pemantauan fisik tersebut dilakukan terhadap:

- a. Pegelolaan sampah dan ruang terbuka hijau
- b. Pengendalian pencemaran air dan

c. Pengendalian pencemaran udara.

Definisi Konsepsional

Strategi Pemerintah Kota Bontang dalam mencapai Penghargaan Adipura tahun 2014 merupakan serangkaian kegiatan atau usaha dan cara atau metode yang dilakukan untuk memberdayakan seluruh elemen pendukung baik Pemerintah Kota Bontang maupun masyarakat dan swasta agar senantiasa bekerjasama dalam memelihara kebersihan kota untuk mencapai hasil yang maksimal, dengan adanya program Adipura yang merupakan sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengendalian lingkungan perkotaan, Pemerintah Kota Bontang melakukan upaya untuk mewujudkan tata ruang kota hijau, bersih, nyaman, dan mampu mengatasi pengelolaan dan pemanfaatan sampah dengan baik, sehingga adanya sinergi antara strategi pemerintah kota, masyarakat dan swasta.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan bentuk dan format judul penelitian, maka dapat di kategorikan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Artikel ini memakai data-data dari penelitian di lapangan yang penulis lakukan di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Penataan kondisi fisik lingkungan perkotaan, meliputi :
 - 1.1 Pengembangan dan pengelolaan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - 1.2 Pemeliharaan Taman Kota
 - 1.3 Penataan kawasan pemukiman penduduk
2. Manajemen operasional kebersihan:
 - 2.1 Ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan.
 - 2.2 Ketersediaan tenaga kebersihan / sumber daya manusia.
3. Program sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah.

Dengan sumber data yang ditentukan menggunakan teknik *Purposive Sampling* tujuannya adalah untuk memperoleh sampel orang yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya dan *Accidental Sampling*. Adapun *key informan* dalam penelitian ini adalah Walikota Bontang, dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang. Kemudian yang menjadi *informan* dalam penelitian ini adalah, Walikota Bontang, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang, Kassubid Pemeberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang, Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK Kota Bontang, Kepala Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK Kota Bontang dan Masyarakat yang sedang berurusan di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang dan Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK Kota Bontang. Untuk menentukan masyarakat yang dijadikan sebagai *informan* peneliti menggunakan *Accidental Sampling*. Yang dimaksud dengan *Accidental Sampling* adalah pemilihan *informan* secara

kebetulan atau aksidental dengan pemilihan yaitu siapa saja yang kebetulan ada atau dijumpai menurut keinginan peneliti. Dan penggunaan prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen. Selanjutnya data tersebut direduksi, disajikan, dan diambil sebuah kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kota Bontang

Kota Bontang merupakan salah satu kota yang ada di provinsi Kalimantan Timur. Kota yang di tetapkan pada tanggal 12 Oktober 1999 ini, sudah tujuh kali memboyong piala Adipura secara berturut-turut, di mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2014. Dibawah kepemimpinan Ir. H. Adi Darma, M.Si selaku Walikota Bontang, dan H. Isro Umargani selaku Wakil Walikota Bontang, membawa visi dan misi dalam menghadapi tantangan Kota Bontang kedepan menuju kondisi yang diinginkan, visi harus disusun secara terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil ataupun manfaat.

Pemerintah Kota Bontang mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan kemana Kota Bontang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat terus menjaga kelestarian lingkungan ditengah kemajuan peradaban saat ini.

Sejalan dengan itu Visi Kota Bontang Tahun 2011-2016 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera“.

Visi ini diharapkan dapat mewujudkan, keinginan, dan amanat masyarakat Kota Bontang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Bontang tersebut, maka ditetapkan Misi yang merupakan pernyataan dan usaha serta upaya pencapaian visi.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh jajaran organisasi dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui keberadaan dan peran dari Pemerintah Kota Bontang.

Untuk itu Pemerintah Kota Bontang menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Bontang yang berakhlak mulia dan profesional.
2. Meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
4. Memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang dengan mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta Infrastruktur lainnya.

Sejalan dengan visi dan misi yang ada, Walikota Bontang bekerjasama dengan seluruh SKPD yang ada dalam mewujudkan pembangunan yang tidak mengabaikan kelestarian lingkungan yang ada. Bersama dengan Badan

Lingkungan Hidup kota Bontang, dan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kota Bontang, Pemerintah Kota Bontang berkomitmen tegas dalam hal pemeliharaan kelestarian lingkungan. Melalui program Adipura yang dilakukan setiap tahunnya tentu menjadi sebuah tanggung jawab besar bagi Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang dan Dinas kebersihan Pertamanan dan PMK Kota Bontang, mengingat bahwa BLH sebagai *leading sector* untuk mendapatkan Adipura dan Dinas kebersihan Pertamanan dan PMK sebagai pelaksana dilapangan. Berhasil meraih penghargaan Adipura selama tujuh kali berturut-turut, merupakan sebuah prestasi yang tidak mudah untuk diraih oleh Kota Bontang, diperlukan strategi yang matang dan perencan yang baik agar bisa terus dipertahankan.

Strategi Pemerintah Kota Bontang dalam Mencapai Penghargaan Adipura Tahun 2014

Pola atau strategi dalam meraih penghargaan Adipura di tahun 2014, Pemerintah Kota Bontang menyiapkan seluruh elemen pendukung untuk saling bekerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pengendalian dan pengelolaan kebersihan dilakukan oleh Pemerintah kota yang dikonsentrasikan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang dan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kota Bontang. Bekerjasama dengan Dinas-Dinas lain yang juga terkait dalam upaya mencapai tujuan agar terciptanya kondisi perkotaan yang teduh dan ramah lingkungan, dapat dicapai Pemerintah Kota Bontang bersama jajaranya dengan melakukan strategi fungsional manajemen yaitu suatu strategi yang menjalankan fungsi manajemen berupa perencanaan, pengawasan, komunikasi, pengambilan keputusan, motivasi kerja, dan integritas serta pelaksanaan kerja.

Penataan Kondisi Fisik Lingkungan Perkotaan, meliputi : Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*) seperti mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga), kenyamanan fisik (teduh, segar), keinginan dan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangibile*) seperti perlindungan tata air dan konservasi hayati atau keanekaragaman hayati. Strategi penataan kondisi fisik lingkungan perkotaan berkaitan erat dengan kawasan RTH, karena kondisi kota yang sehat hanya akan terjadi apabila sirkulasi udaranya baik, tidak tercemar, dan berpolusi, sehingga pemerintah perlu mengembangkan dan mengelola kawasan RTH untuk menjaga keteduhan kawasan perkotaan.

Seluruh *stakeholder* yang ada di Kota Bontang, disiapkan dalam pengembangan RTH agar mencapai target yang diharapkan. Kota Bontang sudah memiliki kawasan ruang terbuka hijau yang di kelola dengan baik oleh pemerintah maupun swasta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tahap pengembangan dan pengelolaan kawasan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang cukup

baik dalam tolak ukur pencapaian yang diharapkan, namun ini akan lebih ditingkatkan dan diperbanyak lagi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa dalam perencanaan tata ruang wilayah kota harus ditambahkan rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH), jenis dan persentase keberadaan RTH ini penyebarannya, terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Disebutkan dalam Undang-Undang ini bahwa, proporsi ruang terbuka hijau paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

Pemeliharaan Taman Kota

Selain berfungsi untuk menjaga kualitas lingkungan perkotaan yang padat aktifitas, taman kota dapat menumbuhkan rasa sosial yang tinggi didalam lingkungan perkotaan yang kini mengarah pada individualitas. Menumbuhkan rasa toleransi tidak hanya terhadap sesama manusia, melainkan terhadap makhluk hidup lainnya. Taman yang baik merupakan cerminan kota dengan manusia (masyarakat) yang baik. Manusia (masyarakat) merupakan aspek penting dalam sebuah kota, sehingga kualitas masyarakat akan mempengaruhi kualitas sebuah kota.

Taman kota merupakan tempat yang luas dan besar guna mengurangi suasana kepadatan kota, dan untuk menghasilkan kesegaran udara kota (paru-paru kota) serta memberi suasana yang sejuk bagi penduduk kota. Pemerintah Kota Bontang berupaya menghadirkan taman kota yang bersih dan dapat dijadikan sebagai sarana untuk masyarakat beraktivitas. Dengan keberadaan taman kota memberi dorongan untuk rekreasi di ruang terbuka dengan segala musim bagi penduduk dan pendatang lainnya di Kota Bontang. Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK juga berupaya keras dalam pemeliharaan taman kota agar dapat terjaga kualitas tanaman yang tumbuh di sekitar taman, begitu juga dengan masalah kebersihan.

Penataan Kawasan Pemukiman Penduduk

Infrastruktur dapat dibedakan menjadi infrastruktur fisik dan infrastruktur sosial. Infrastruktur fisik meliputi, penyediaan air bersih, jaringan jalan, pengelolaan persampahan, sistem drainase, jaringan listrik dan telekomunikasi, sanitasi, serta sistem pembuangan air limbah. Sedangkan infrastruktur sosial meliputi, fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan, pelayanan umum, peribadatan, rekreasi, kebudayaan, olahraga, dan lapangan terbuka. Infrastruktur merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengidentifikasi permukiman kumuh di perkotaan.

Elemen dasar lingkungan perumahan menurut Dirjen Cipta Karya, secara garis besar dapat dikelompokkan dalam infrastruktur fisik, antara lain:

- 1) Jaringan jalan
- 2) Sistem drainase
- 3) Jaringan air bersih
- 4) Pengelolaan sampah
- 5) Pengolahan air limbah

Dalam hal ini pemerintah kota Bontang sudah berupaya dengan baik mewujudkan suasana pemukiman yang layak untuk dihuni oleh masyarakat, bekerjasama dengan pihak swasta pemerintah melakukan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kota Bontang. Semeniasi jalan di setiap gang juga sudah dilakukan, pembangunan sistem drainase dan jaringan air bersih juga di upayakan oleh pemerintah agar bisa secara menyeluruh dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Manajemen Operasional Kebersihan, meliputi: Ketersediaan Prasarana dan Sarana Kebersihan

Pentingnya ketersediaan alat kelengkapan untuk para petugas kebersihan dilapang merupakan sebuah penunjang yang sangat perlu untuk diperhatikan. Sarana dan prasarana merupakan satu kesatuan harus ada untuk memaksimalkan kinerja yang dilakukan. Untuk mencapai hasil yang baik, Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK memberikan fasilitas kebersihan untuk para petugas dilapangan berupa mobil pengangkut sampah, tempat pembuatan kompos, tong sampah, serok, sapu jalan, mobil penyiram dan perlengkapan lain yang dibutuhkan. Sepanjang jalan Kota Bontang sudah disediakan tempat-tempat pembuangan sampah untuk mengurangi penumpukan sampah. Setiap harinya para petugas kebersihan disebar keberbagai lokasi yang sudah ditetapkan untuk dibersihkan. Untuk petugas pengangkut sampah setiap hari bertugas mengangkut sampah dari setiap tempat pembuangan sementara yang ada di sekitar pemukiman warga untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir, lalu diproses lebih lanjut, pengangkutan sampah tersebut dilakukan dua kali dalam satu hari. Pemerintah Kota Bontang juga sudah menyiapkan area khusus untuk tempat pembuangan akhir, yang sampah-sampah yang telah dikumpulkan akan dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya baru kemudian diproses dengan alat yang telah disediakan.

Ketersediaan Tenaga Kebersihan (SDM)

SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau jadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain. Sumber daya manusia juga dapat diartikan sebagai tenaga atau kekuatan/kemampuan yang dimiliki oleh seseorang berupa daya pikir, daya cipta, dan daya karsa yang masih tersimpan dalam dirinya sebagai energi potensial yang siap dikembangkan menjadi daya-daya berguna sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) dimaksudkan agar jumlah kebutuhan tenaga

kerja masa kini dan masa depan sesuai dengan beban pekerjaan, kekosongan-kekosongan dapat dihindarkan dan semua pekerjaan dapat dilaksanakan.

Pemerintah Kota Bontang juga memperhatikan orang-orang yang bekerja keras dilapangan. Harus ada penghargaan atas prestasi yang diberikan dan harus diterapkan hukuman atas kesalahan yang dilakukan, agar dalam menjalankan kewajibannya seorang pekerja terus berkomitmen untuk menuntaskan kewajibannya dengan baik. Para petugas kebersihan DKPP Kota Bontang di berikan bonus penghasilan, oleh Walikota Bontang sebesar 2 Juta rupiah per orang, jika piala Adipura bisa terus diraih oleh Kota Bontang. Dan ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Bontang, dengan memberikan motivasi kerja kepada para pahlawan lingkungan yang berhasil menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan perkotaan. Disini terlihat bahwa Pemerintah Kota Bontang begitu memperhatikan para pekerjanya, dan sangat konsisten dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan.

Program sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah

Suatu program atau rancangan atau strategi yang dibuat oleh suatu lembaga sebelum ditetapkan perlu adanya sosialisasi. Sosialisasi dilakukan sebagai bentuk perkenalan suatu program yang direncanakan agar jelas maksud dan tujuan pelaksanaannya. Sama halnya dengan strategi Pemerintah Kota Bontang dalam mencapai Penghargaan Adipura tentunya mempunyai berbagai rancangan strategi yang ingin dilakukan, sehingga agar tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan, Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak ada komunikasi yang tidak tersampaikan dengan baik antara Pemerintah dan masyarakat.

Seringkali kita mendengar, membaca dan melihat sebuah proses sosialisasi yang dilakukan Pemerintah kepada masyarakat, untuk memperkenalkan sebuah pogram kerja yang ingin diimplementasikan. Namun banyak respon masyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentu tidak mudah untuk merubah prilaku masyarakat yang membudaya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak masyarakat yang acuh tak acuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan, karena masyarakat berfikir bahwa itu hanya untuk kepentingan sekelompok orang saja.

Salah satu bentuk nyata dari budaya hijau adalah berupa pendirian Bank Sampah. Bank Sampah Kelola Mandiri adalah Bank Sampah pembina dari Bank Sampah Unit (BSU) yang ada di setiap kelurahan di kota Bontang. Dengan motto “Mengubah Sampah Menjadi Rupiah”, masyarakat dimotivasi untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan memberikan edukasi bahwa sampah memiliki nilai ekonomis untuk menambah *income* keluarga. Secara resmi Bank Sampah mulai beroperasi pada April 2011. Sejak kali pertama didirikan, jumlah Bank Sampah terus meningkat. Pada 2013 telah berdiri 15 unit Bank Sampah dengan volume sampah sebanyak 2.100 kg. Sementara itu, jumlah nasabah telah mencapai 1.310 orang.

Partisipasi masyarakat menjadi sebuah point penting demi terciptanya kawasan kota yang bersih. Berdasarkan pengamatan/observasi peneliti dilapangan partisipasi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar cukup besar, terlihat dari berdirinya bank-bank sampah yang dikelola oleh masyarakat baik di kawasan pemukiman penduduk maupun ditingkatan sekolah-sekolah.

Kesimpulan

Adapun Strategi Pemerintah Kota Bontang dalam Mencapai Penghargaan Adipura Tahun 2014 yang disimpulkan pada kesimpulan berikut:

1. Penataan kondisi fisik lingkungan perkotaan, dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang dengan memaksimalkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau yang sampai saat ini terus dilakukan, dengan melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada, sebagai bentuk kerjasama dan kepedulian terhadap lingkungan. Penataan dan pemeliharaan taman kota juga terus dilakukan untuk menjaga kestabilan ekologi, dengan melakukan penyiraman, pembibitan, dan pemeliharaan untuk tanaman-tanaman yang kering/layu, agar nilai keindahan sebuah taman tetap terjaga kualitasnya. Selain itu Pemerintah Kota Bontang memanfaatkan dana CSR perusahaan untuk mengembangkan penataan kawasan pemukiman penduduk, melalui program-program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bontang, agar masyarakat bisa mendapatkan kehidupan yang layak.
2. Manajemen operasional kebersihan dioptimalkan dalam pemenuhan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana operasional kebersihan. Ketersediaan sumber daya manusia juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Pemerintah Kota Bontang berupaya untuk mengimbangi antara kapasitas alat kebersihan, ketersediaan petugas kebersihan, dan lokasi yang harus di kerjakan. Dibawahi oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK para petugas kebersihan setiap harinya bekerja mulai dari pagi hingga sore hari untuk membersihkan jalan dari sampah yang berserakan. Sedangkan, pengangkutan sampah dilakukan dua kali dalam sehari, untuk menghindari penumpukan sampah di TPS-TPS yang ada dan setelah itu sampah langsung di bawa ke Tempat Pembuangan Akhir untuk diproses. Tidak hanya sampah darat, sampah-sampah laut juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Bontang, dengan menghadirkan petugas sampah laut sebagai inovasi baru dalam bidang kebersihan.
3. Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK Kota Bontang melakukan kerjasama dengan perusahaan, kelurahan, maupun sekolah-sekolah yang ada di Kota Bontang melalui sosialisasi atau penyuluhan. Sosialisasi yang disampaikan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah, melalui bank-bank sampah yang bisa dikelola sendiri oleh masyarakat selain itu juga bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat, karena produk yang dihasilkan oleh bank sampah, akan dibeli oleh SKPD Kota Bontang, sehingga ada timbal balik yang diberikan oleh Pemerintah untuk masyarakat.

Saran

Adapun saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya sosialisasi peraturan tentang kelestarian lingkungan. Melalui media sosial, poster, bahkan aksi peduli lingkungan agar sosialisasi peraturan tentang kelestarian lingkungan yang dilakukan dapat dilihat oleh banyak orang, dan mempercepat penyampaian informasi yang ingin disampaikan.
2. Strategi Pemerintah Kota Bontang dalam bidang kebersihan, sudah cukup maksimal. Akan tetapi untuk lebih lanjut, alangkah baiknya jika bisa lebih banyak program yang dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan rutin dari pemerintah agar program yang dicanangkan, bisa terus menerus dikembangkan.
3. Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang dapat memanfaatkan Bank Sampah sebagai produk unggulan Kota Bontang, agar banyak masyarakat yang tertarik untuk mengelola bank sampah, sehingga pemanfaatan sampah bisa lebih dioptimalkan dan menjadikan masyarakat lebih kreatif dalam berinovasi.
4. Dinas Kebersihan Pertaman dan PMK diharapkan bisa lebih melengkapi ketersediaan alat-alat kebersihan yang lebih lengkap dan layak pakai, serta dapat meningkatkan ketersediaan jumlah tenaga kebersihan yang dibutuhkan, sehingga manajemen operasional kebersihan berjalan tanpa hambatan.
5. Selain itu perlu diupayakan suatu pengelolaan yang matang, tentang keberadaan perahu sampah dan petugas sampah laut, yang sangat unik dan belum banyak daerah yang mengopersikannya. Jika pengelolaannya bisa dilakukan lebih baik, maka kebersihan pada kawasan pemukiman di atas air dan daerah pesisir akan bersih dari sampah. Selain itu strategi ini akan menjadi inspirasi untuk daerah lain.

Daftar Pustaka

- Alwi, Syafaruddin. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Keunggulan Kompetitif*. Yogyakarta: BPFE.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bryson, J.M., (2005), *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Daft, Richard L. 2002. *Manajemen*. Edisi Ke-5. Jakarta: Erlangga
- Darmawan, E, 2009, *Ruang Publik dalam Arsitektur Kota*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Kodoatie, Robert J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kriyantono, Rachmat, 2006. *Tehnik praktis riset komunikasi*. Jakarta: PT. Prenanda Media Obor Indonesia.

- Michael, E Porter. 2002. *Strategi Bersaing (Competitive Strategy)*, penerjemah Rangkuti. Tangerang: Kharisma Publishing Group.
- Moleong, 2005. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moleong. J. Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2002. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurmadi, Achmad. 2006. *Manajemen Perkotaan; Aktor, Organisasi, Pengelolaan Daerah Perkotaan dan Metropolitan di Indonesia*. Yogyakarta: Sinergi Publishing
- Oliver, Sandra. 2007. *Strategi Public Relation*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sanjaya, Wina. 2008. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Media Predana.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV.Alfabeta.

Dokumen-dokumen:

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 *tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 *tentang Pengelolaan Sampah*.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 *tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Adipura*.
- Arsip/dokumen Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang *tentang Titik Pantau Adipura*.
- Arsip/dokumen Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang *tentang Indikator Penilaian Adipura*.

Sumber Internet :

- <http://alamendah.org/2014/06/06/daftar-kota-peraih-adipura-tahun-2014/>(diakses pada tanggal 23 Januari 2015)
- <http://bapelkescikarang.or.id/2013/kriteria-penilaian-adipura-di-indonesia&kesehatan/>(diakses pada tanggal 9 Januari 2015)
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Adipura/>(diakses pada tanggal 3 Januari 2015)
- <http://mediaindonesia.com/mipagi/read/3399/Penilaian-Adipura-Diubah/2014/08/28/>(diakses pada tanggal 23 Januari 2015)
- <http://menlh.go.id/2014/nilai-kota-adipura-dipublikasikan-klh/>(diakses pada tanggal 9 Januari 2015)